



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3783-3791
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM melalui Program KKN
UNIWARA di Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten
Pasuruan**

**Yono Sutrisno¹, Dewi Masitho Istiqomah²,
Fifi Lailatun Nikma³, Nanik Setyawati⁴, Firdan Usnandri⁵**
^{1,2,3,4,5} Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan, Indonesia

Email : yonosutrisno548@gmail.com¹, dewimasithoistiqomah@gmail.com²,
lailatunnikmafifi@gmail.com³, naniksetyawati30@gmail.com⁴, firdanusnandri@gmail.com⁵

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam pemahaman dan pengelolaan legalitas usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, dalam memenuhi legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara, perencanaan tindakan, sosialisasi, pendampingan pengelolaan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi dan refleksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung membantu pelaku UMKM memahami manfaat legalitas usaha, persyaratan administrasi, serta tahapan pengajuan NIB. Keterlibatan mahasiswa sebagai fasilitator juga membantu mengurangi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses administrasi. Selain itu, pendampingan aspek halal memberikan pemahaman tambahan bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak pada sektor pangan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usahanya. Keberlanjutan pendampingan diperlukan agar legalitas yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, NIB, Pendampingan.*

***Business Legal Assistance for MSMEs through the UNIWARA KKN
Program in Gayam Village, Gondangwetan District, Pasuruan
Regency***

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting the local economy; however, some MSME owners still face difficulties in understanding and obtaining business legality. This community service activity aimed to improve the understanding and ability of MSME owners in Gayam Village, Gondangwetan District, Pasuruan Regency, to fulfill business legality requirements, particularly the Business Identification Number (NIB). The activity was implemented through the Community Service

Program (KKN) of Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) using a Participatory Action Research (PAR) approach. The activities consisted of problem identification through observation and interviews, action planning, socialization, assistance in obtaining business legality through the Online Single Submission (OSS) system, and evaluation and reflection. The results showed that direct assistance helped MSME owners understand the benefits of business legality, administrative requirements, and the procedures for obtaining an NIB. The involvement of students as facilitators also helped reduce the administrative difficulties encountered by business owners during the registration process. In addition, assistance related to halal aspects provided additional knowledge for MSME owners, particularly those engaged in food-related businesses. This activity demonstrates that needs-based assistance can improve the understanding, awareness, and independence of MSME owners in managing their business legality. Continued assistance is recommended to ensure that the obtained legality can be effectively utilized to support sustainable business development.

Keywords: MSMEs, Business Legality, Business Identification Number, Assistance.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keberadaan UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Namun, perkembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kegiatan produksi dan pemasaran, tetapi juga memerlukan aspek legalitas usaha yang jelas. Legalitas usaha penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta dapat membantu UMKM memperoleh akses terhadap permodalan, program pemerintah, dan pengembangan usaha (Septiyah et al., 2024).

Salah satu bentuk legalitas usaha yang penting bagi UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan proses pendaftaran legalitas secara elektronik. Selain sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB dapat mendukung kemudahan dalam pengurusan perizinan dan akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha (Rusmayani et al., 2025).

Meskipun proses pengurusan NIB telah dilakukan secara digital melalui OSS, dalam praktiknya masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami manfaat legalitas usaha maupun prosedur pendaftarannya. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan mengenai tahapan pendaftaran, serta keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital (Rusmayani et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital saja belum cukup, sehingga diperlukan pendampingan secara langsung agar pelaku UMKM dapat memahami dan menyelesaikan proses legalitas usahanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang menjadi fokus kegiatan adalah masih terbatasnya pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan dalam mengurus legalitas usaha, khususnya NIB melalui OSS. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha yang memadai dan berpotensi mengalami hambatan dalam mengembangkan usaha, memperoleh akses permodalan, maupun mengikuti program pemberdayaan pemerintah. Hasil kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung dapat membantu pelaku UMKM memahami proses pendaftaran NIB dan menyelesaikan pengajuannya melalui OSS (Sarwoko & Nurfarida, 2024). Oleh karena itu, kegiatan KKN UNIWARA diarahkan untuk memberikan pendampingan yang praktis dan mudah dipahami kepada pelaku UMKM di Desa Gayam agar mereka tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mampu mengikuti proses pengurusan NIB secara langsung.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pendampingan legalitas usaha bagi UMKM melalui program KKN UNIWARA. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan,

yaitu identifikasi dan pendataan UMKM, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB, pendampingan pendaftaran melalui sistem OSS, membantu pelaku usaha dalam melengkapi dan menginput data yang diperlukan, serta pendampingan hingga NIB berhasil diterbitkan. Pola tersebut sejalan dengan kegiatan pendampingan UMKM sebelumnya yang menggunakan tahapan sosialisasi, pendaftaran, pendampingan langsung, dan penyerahan NIB kepada pelaku usaha (Rusmayani et al., 2025).

Target kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Gayam mengenai pentingnya legalitas usaha serta membantu pelaku UMKM memperoleh NIB sebagai bukti legalitas usaha. Selain itu, kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan OSS secara mandiri sehingga mereka lebih siap mengembangkan usahanya secara legal dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses permodalan, program pemerintah, serta kerja sama usaha. Pendampingan serupa menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai OSS dan NIB serta membantu peserta memperoleh NIB sebagai bukti legalitas usaha (Supriyo et al., 2023).

METODE

Lokasi dan waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan merupakan bagian dari pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Wiranegara yang dilakukan pada tahun 2026. Desa Gayam dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan hasil observasi awal terhadap kondisi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usaha di wilayah tersebut.

Berdasarkan identifikasi awal, diketahui bahwa sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi dan legalitas usaha. Beberapa pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan sebagian lainnya masih belum memahami prosedur pendaftaran legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan secara langsung agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh informasi mengenai legalitas usaha, tetapi juga mampu mengikuti proses pengurusannya.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahap yang meliputi observasi dan identifikasi UMKM, sosialisasi, pendampingan administrasi, pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendampingan legalitas usaha melalui pendekatan langsung dinilai dapat membantu pelaku UMKM memahami persyaratan dan prosedur pengurusan NIB secara lebih praktis (Wulandari & Budiantara, 2022).

Khalayak sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, khususnya pelaku usaha yang belum memiliki NIB atau mengalami kesulitan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Sasaran kegiatan mencakup pelaku usaha dari berbagai bidang, terutama usaha mikro yang memerlukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi.

Pelaku UMKM dipilih sebagai sasaran karena keberadaan legalitas usaha merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Kepemilikan NIB memberikan identitas resmi bagi pelaku usaha serta menjadi bagian dari kemudahan dalam mengakses berbagai program dan layanan pengembangan usaha. Namun, proses pendaftaran berbasis digital masih dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau belum memahami prosedur administrasi.

Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dilakukan secara langsung dengan melibatkan mahasiswa KKN sebagai fasilitator. Mahasiswa membantu pelaku UMKM dalam memahami tahapan pengurusan legalitas, menyiapkan data yang diperlukan, dan

mendampingi proses pendaftaran melalui sistem OSS. Kegiatan serupa menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan NIB (Septiyah et al., 2024).

Metode / pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dengan menempatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses kegiatan. Pendekatan ini digunakan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan pada upaya membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan observasi awal. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan pendataan dan pengamatan terhadap pelaku UMKM untuk mengetahui kondisi usaha, kepemilikan legalitas, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan NIB. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha. Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai manfaat NIB, fungsi legalitas usaha, persyaratan administrasi, serta prosedur pendaftaran melalui sistem OSS. Sosialisasi dilakukan sebagai tahap awal sebelum pelaku UMKM mengikuti proses pendampingan teknis.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan NIB melalui OSS. Mahasiswa KKN membantu pelaku UMKM dalam mempersiapkan persyaratan dan data yang dibutuhkan, menginput informasi usaha, serta mengikuti tahapan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap agar pelaku usaha dapat memahami proses yang dijalankan. Pola pendampingan seperti ini telah banyak diterapkan dalam kegiatan pengabdian dan membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha melalui sistem OSS (Halim et al., 2023; Wulandari & Budiantara, 2022).

Selain pengurusan NIB, kegiatan juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya aspek halal, khususnya bagi UMKM yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Pemahaman tersebut diberikan sebagai pengetahuan tambahan dalam mendukung pengembangan usaha yang lebih tertib secara administrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Metode evaluasi dan Indikator keberhasilan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta keterlibatan pelaku UMKM selama proses pendampingan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan memahami tahapan pendaftaran melalui OSS, serta hasil pendampingan yang telah dilakukan.

Keberhasilan kegiatan dilihat dari meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat NIB dan legalitas usaha, kemampuan pelaku usaha dalam menyiapkan persyaratan administrasi, serta terlaksananya proses pendampingan pendaftaran NIB. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran pelaku UMKM untuk menjalankan dan mengembangkan usaha secara legal.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengetahui kendala yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum mampu menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri, maka diperlukan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada penerbitan NIB, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usahanya.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pendampingan legalitas usaha merupakan salah satu bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Wiranegara yang dilaksanakan di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memberikan pendampingan teknis dalam proses pendaftarannya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi dan pendataan terhadap pelaku UMKM di Desa Gayam. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jenis usaha yang dijalankan, kondisi administrasi usaha, serta pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan belum memahami secara menyeluruh fungsi serta prosedur pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokumen administrasi, tetapi juga dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan sistem pendaftaran berbasis digital. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pendampingan secara langsung oleh mahasiswa KKN.

Secara umum, hasil pelaksanaan kegiatan dapat dirangkum berdasarkan beberapa aspek kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Pendampingan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Desa Gayam

No.	Aspek Kegiatan	Hasil yang Diperoleh
1.	Observasi dan pendataan	Diperoleh informasi mengenai kondisi usaha, jenis usaha, dan kepemilikan legalitas usaha pelaku UMKM.
2.	Sosialisasi legalitas usaha	Pelaku UMKM memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB.
3.	Persiapan administrasi	Pelaku UMKM dibantu dalam mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran.
4.	Pendampingan OSS	Pelaku UMKM memperoleh bantuan dalam penginputan data dan tahapan pengajuan NIB melalui sistem OSS.
5.	Edukasi aspek halal	Pelaku UMKM, khususnya bidang makanan dan minuman, memperoleh pemahaman awal mengenai pentingnya aspek halal dalam pengembangan usaha.
6.	Evaluasi kegiatan	Terlihat adanya peningkatan pemahaman dan antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti proses pendampingan legalitas usaha.

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada proses administratif pengurusan NIB, tetapi juga mencakup peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Pendekatan yang dilakukan secara langsung memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi sekaligus mempraktikkan tahapan pengurusan legalitas dengan didampingi oleh mahasiswa KKN.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM memberikan respons yang cukup baik terhadap kegiatan pendampingan. Antusiasme terlihat terutama ketika peserta memperoleh penjelasan mengenai manfaat NIB dan ketika mengikuti proses teknis pendaftaran melalui sistem OSS. Pelaku usaha juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kendala yang mereka alami, baik berkaitan dengan persyaratan administrasi maupun penggunaan sistem digital.

Selain itu, pemberian materi mengenai aspek halal memberikan tambahan pengetahuan bagi pelaku UMKM, terutama yang menjalankan usaha di bidang makanan dan minuman. Pemahaman tersebut penting karena legalitas dan kelengkapan administrasi

usaha merupakan salah satu bagian yang dapat mendukung pengembangan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung merupakan pendekatan yang relevan dalam membantu pelaku UMKM memahami proses legalitas usaha. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai fungsi NIB dan mekanisme pendaftaran melalui sistem OSS. Kondisi tersebut menyebabkan proses legalisasi usaha belum menjadi perhatian utama bagi sebagian pelaku UMKM.

Permasalahan tersebut dapat dipahami karena pengelolaan legalitas usaha saat ini memanfaatkan sistem digital yang mengharuskan pelaku usaha mampu memahami tahapan pendaftaran dan melakukan penginputan data secara mandiri. Bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, proses tersebut dapat menjadi hambatan. Oleh sebab itu, pendampingan secara tatap muka memberikan solusi praktis karena pelaku usaha dapat memperoleh penjelasan dan bantuan pada saat menghadapi kendala.

Peningkatan pemahaman pelaku UMKM setelah mengikuti pendampingan menunjukkan bahwa pemberian informasi yang disertai praktik secara langsung lebih mudah diterima dibandingkan penyampaian materi secara teoritis saja. Mahasiswa KKN dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta memahami setiap tahapan pengelolaan legalitas usaha.

Temuan ini sejalan dengan Wulandari dan Budiantara (2022) yang menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS dapat membantu masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha. Pendampingan menjadi penting karena digitalisasi pelayanan administrasi dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang belum memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem berbasis daring.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Halim et al. (2023), yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara langsung dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Dalam konteks kegiatan di Desa Gayam, pendampingan secara bertahap memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk tidak hanya mengetahui manfaat NIB, tetapi juga memahami proses pengurusannya secara praktis.

Dari hasil evaluasi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Sebagian pelaku UMKM membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan persyaratan administrasi dan mengoperasikan sistem OSS. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi administrasi dan digital bagi pelaku UMKM masih diperlukan. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha sebaiknya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau pengajuan NIB, tetapi dapat dilanjutkan dengan pendampingan administrasi usaha lainnya.

Pendampingan mengenai aspek halal juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, pemahaman mengenai aspek halal dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung pengembangan usaha. Pemberian pemahaman sejak tahap awal diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kelengkapan administrasi dan aspek legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan legalitas usaha di Desa Gayam menunjukkan bahwa program KKN dapat berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan nyata pelaku UMKM. Kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai legalitas usaha, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada pelaku usaha dalam memahami dan menjalankan proses administrasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola legalitas serta administrasi usahanya.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem OSS
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2026)



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Pelaku UMKM
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2026).



Gambar 3. Kegiatan Observasi dan Pengenalan Produk Usaha UMKM kepada Tim KKN UNIWARA
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2026)

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan yang dilakukan melalui observasi, sosialisasi, pendampingan administrasi, dan pendampingan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) mampu memberikan pemahaman yang lebih praktis kepada pelaku UMKM.

Keterlibatan mahasiswa KKN sebagai fasilitator juga membantu mengurangi kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memahami persyaratan dan proses administrasi. Selain itu, pemberian pemahaman mengenai aspek halal menjadi pengetahuan tambahan yang bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Keberlanjutan pendampingan diperlukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan legalitas yang telah diperoleh untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusmayani, A., Qolbiyah, L., Permatasari, W., Pertanian, P. S., Pertanian, F., Mukti, U. W., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Mukti, U. W., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Mukti, U. W., Lampegan, D., Ibun, K., & Lampegan, D. (2025). *PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI DASAR LEGALITAS USAHA PADA UMKM DESA*. 5(2), 1–7.
- Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2024). *LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL MELALUI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)*.
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Ilhama, N. (2024). *PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA KEDUNGBENDO MELALUI OSS*. 3(1), 88–92.
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 4(1), 44–52.
- Halim, E. G., Septyaningrum, D. P., Dirgantari, S. N. M., & Arundinasari, I. (2023). Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1189>.
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 88–92. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Halim, E. G., Septyaningrum, D. P., Dirgantari, S. N. M., & Arundinasari, I. (2023). Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1189>
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 88–92. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan

hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 44–52.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>